

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pemerintah daerah menetapkan penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah dengan berdasarkan pada indikator sebagai sarana alat ukur pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan target sebagai batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam setahun serta kualitas jumlah mutu barang, jasa, sumber daya manusia sehingga penerapan SPM dapat diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar dengan kriteria penerapan capaian sebagai berikut:

Tabel 4.1: Kriteria Penerapan Capaian Standar Pelayanan Minimal

NOMOR	KATEGORI	NILAI	WARNA
1	TUNTAS PARIPURNA	100	HIDAU
2	TUNTAS UTAMA	90-99	COKLAT
3	TUNTAS MADYA	80-89	KUNING
4	TUNTAS PRATAMA	70-79	BIRU
5	TUNTAS MUDA	60-69	UNGU
6	BELUM TUNTAS	< 60	Merah

Sumber Data: Permendagri 59 Tahun 2021

A. URUSAN PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan Daerah

1. Kondisi dan Capaian SPM

Kondisi dan capaian SPM Urusan Pendidikan masih belum tercapai sepenuhnya sesuai target RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD 2023 Provinsi Sulawesi Utara, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2: Kondisi dan capaian SPM Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			86.57 %
1 .	Pendidikan Menengah					86.23 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	69.77 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		135.178	117.886	17.292	87.21 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.46 %
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	82.32 %

	SMA					
1	Angka partisipasi kasar	%	100	103.34	-3.34	100.00 %
2	Angka partisipasi sekolah	%	100	75.83	24.17	75.83 %
3	Angka partisipasi murni	%	100	60.28	39.72	60.28 %
4	Kemampuan literasi	Nilai	100	60.71	39.29	60.71 %
5	Kemampuan numerasi	Nilai	100	59	41	59.00 %
6	Perbedaan skor literasi	Nilai	10	10	0	100.00 %
7	Perbedaan skor numerasi	Nilai	10	10	0	100.00 %
8	Indeks iklim keamanan	Nilai	100	85	15	85.00 %
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	100	85	15	85.00 %
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	86	14	86.00 %
11	Indeks distribusi guru	%	100	91	9	91.00 %
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	100	91	9	91.00 %
13	Proporsi PTK penggerak	%	100	52	48	52.00 %
14	Pengalaman pelatihan guru	%	100	93	7	93.00 %
	SMK					
1	Angka partisipasi kasar	%	100	103.34	-3.34	100.00 %
2	Angka partisipasi sekolah	%	100	75.83	24.17	75.83 %
3	Angka partisipasi murni	%	100	62.28	37.72	62.28 %
4	Kemampuan literasi	%	100	55.61	44.39	55.61 %
5	Kemampuan numerasi	Nilai	100	58	42	58.00 %
6	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	100	92	8	92.00 %
7	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	100	91	9	91.00 %
8	Perbedaan skor literasi	Nilai	10	10	0	100.00 %
9	Perbedaan skor numerasi	Nilai	10	10	0	100.00 %
10	Indeks iklim keamanan	Nilai	100	86	14	86.00 %
11	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	100	86	14	86.00 %
12	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	89	11	89.00 %
13	Indeks distribusi guru	%	100	92	8	92.00 %
14	Proporsi PTK bersertifikat	%	100	92	8	92.00 %
15	Proporsi PTK penggerak	%	100	59	41	59.00 %
16	Pengalaman pelatihan guru	%	100	92	8	92.00 %
2 .	Pendidikan Khusus					86.91 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	70.29 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1.862	1.636	0.226	87.86 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.62 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	83.12 %
1	Angka partisipasi kasar	%	100	103.34	-3.34	100.00 %
2	Angka partisipasi sekolah	%	100	75.83	24.17	75.83 %
3	Angka partisipasi murni	%	100	60.28	39.72	60.28 %
4	Kemampuan literasi	Nilai	100	61.57	38.43	61.57 %
5	Kemampuan numerasi	Nilai	100	61	39	61.00 %
6	Perbedaan skor literasi	Nilai	10	10	0	100.00 %
7	Perbedaan skor numerasi	Nilai	10	10	0	100.00 %
8	Indeks iklim keamanan	Nilai	100	85	15	85.00 %

9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	100	85	15	85.00 %
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	86	14	86.00 %
11	Indeks distribusi guru	%	100	92	8	92.00 %
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	100	92	8	92.00 %
13	Proporsi PTK penggerak	%	100	72	28	72.00 %
14	Pengalaman pelatihan guru	%	100	93	7	93.00 %

Sumber Data: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut

2. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah. Besaran anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3: Alokasi Anggaran Untuk Penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pendidikan

NO	URAIAN	ANGGARAN APBD 2023		SUMBER YANG LAIN
		INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	
1	Program Enunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	680,096,101,958	706,110,705,078	
2	Program Pengelolaan Pendidikan	444,781,886,359	458,780,100,430	
	SMA	191,497,399,693	193,855,476,138	
	SMK	236,045,702,716	246,389,448,073	
	SLB	17,238,783,950	18,535,176,219	
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	451,900,300	551,900,300	

Sumber Data: Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulut

3. Dukungan Personil

a. Jumlah Pegawai

Tabel 4.4: Jumlah Pegawai Pelaksana Urusan Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1.	PNS	259
2.	Non PNS/THL	98
Jumlah		357

Sumber Data: Dinas Pendidikan Daerah prov. Sulut

b. Kualifikasi Pendidikan

Tabel 4.5: Jumlah Pegawai Pelaksana Urusan Pendidikan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Master (S2)	22
2.	Master (S3)	4
3.	Sarjana (S1)	79
4.	Diploma (DII)	2
5.	Diploma (DIII)	7
6.	Diploma (DIV)	3
7.	SMA/SMK	26
Jumlah		143

Sumber Data: Dinas Pendidikan Daerah prov. Sulut

c. Pangkat dan Golongan

Tabel 4.6: Jumlah Pegawai Pelaksana Urusan Pendidikan Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Golongan IV	19
2.	Golongan III	99
3.	Golongan II	10
Jumlah		128

Sumber Data: Dinas Pendidikan Daerah prov. Sulut

4. Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Tabel 4.7 dibawah ini menunjukan permasalahan yang muncul serta solusi yang diambil untuk mengatasi masalah yang timbul.

Tabel 4.7: Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan

NO	TAHAPAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengumpulan Data	1. Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata; 2. Keterbatasan Anggaran untuk Pendataan anak usia sekolah lingkup Dinas Pendidikan Provinsi karena memerlukan Anggaran yang cukup besar yang mencakup, desa/ Kelurahan, Kecamatan di 15 Kabupaten/Kota yang ada; 3. Tidak adanya basis data yang menjadi acuan yang akan di digunakan (Data Kemdikbud, Kemendagri-GIS Visualisasi Kependudukan) dan BPS berbeda)	Ke depan pendataan harus berbasis desa/kelurahan yang terintegrasi ke dalam sistem pendataan secara nasional
2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	1. Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat. 2. Belum semua admin dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif tapi tidak segera mengajukan penutupan sekolah 3. Belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapodik secara berkala	1. Perlu peningkatan koordinasi dengan kemenag untuk ketersediaan data yang valid dan akuntabel. 2. Perlunya peningkatan kapasitas admin dapodik di satuan pendidikan 3. Perlu dilaksanakan desk verifikasi data pendidikan, karena terbatasnya anggaran.
3	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan	Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan belum maksimal karena belum maksimalnya data yang dan anggaran yang tersedia	Penghitungan kebutuhan disesuaikan realisasi jumlah siswa yang ada sehingga terdapat selisih antara perencanaan dan realisasi
4	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan	Belum ada SOP di tentang pelaksanaan penerapan SPM	Koordinasi dengan Bagian Organisasi untuk penyusunan regulasi dan SOP penerapan SPM

Sumber Data: Dinas Pendidikan Daerah prov. Sulut

B. URUSAN KESEHATAN

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

1. Kondisi dan Capaian SPM

Kondisi dan capaian SPM Urusan Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8: Kondisi dan capaian SPM Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	A KSI
-1	-2	-3	-4			-5	-6
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					90.00 %	
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi		TUNTAS UTAMA			100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		5213	5213	0	100 %	
Pra Krisis Kesehatan							
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang	300	300	0	100%	
	2 Petugas kesehatan	Orang	11	11	0	100%	
	JUMLAH		311	311	0	200%	
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi					80.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		1901	1901	0	100 %	
Tidak Terjadi Kejadian luar Biasa							
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					0.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	0.00 %	
	1 Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit	0	0	0	0.00 %	
	2 Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	Unit	0	0	0	0.00 %	
	3 Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	Unit	0	0	0	0.00 %	
	4 Tempat sampah biologis	Unit	0	0	0	0.00 %	
	5 Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	*	0	0	0	0.00 %	
	6 Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit	0	0	0	0.00 %	

7	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit	0	0	0	0.00 %	
8	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	0	0	0	0.00 %	
9	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	0	0	0	0.00 %	
10	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	0	0	0	0.00 %	
11	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	0	0	0	0.00 %	
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Laboratorium	Orang	0	0	0	0.00 %	
13	Tenaga kesehatan: Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	0	0	0	0.00 %	
14	Tenaga kesehatan: Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	0	0	0	0.00 %	

Sumber Data: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut

2. Alokasi Anggaran

Total Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM Provinsi di Sulawesi Utara tahun 2023 adalah sebesar **Rp 2,500,499,200,-**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.9: Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan

NO	URAIAN	PAGU	REALISASI	KET
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi Bencana Provinsi			
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Rp 100.000.000	Rp 99,376,782	99.38%
	Workshop Penanggulangan Krisis Kesehatan			
	Rapat Rutin 6 bulan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan deteksi dini preventif dan respon penyakit			
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa penyakit			
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp 2,090,749,600	Rp 1,930,867,200	92.35%
	Rapid Health Assesment (RHA)			
	Verifikasi Sinyal /PE Pelacakan Kontak berpotensi Penyakit KLB			

Sumber Data: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut

3. Dukungan Personil

Dalam mengupayakan tercapainya SPM Provinsi bidang Kesehatan ini, maka Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengatur pengorganisasian personelnya sebagai berikut:

a. Manajemen Program

Manajemen Program ini bertugas untuk penyusunan mitigasi bencana dan KLB, peningkatan kapasitas sistem kebencanaan dan response KLB, melakukan pengolahan data dan informasi serta bertugas melakukan Rapid Health Assessment. Adapun dukungan personelnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10: Dukungan Personel Manajemen Program Pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Tinggi Pratama	1 orang
2	Pejabat Administrator	10 orang
3	Pejabat Pengawas	15 orang
4	Pengelola Program	9 orang
5	Pelaksana Rapid Health Asesment	3 orang
6	Fasilitator Peningkatan Kapasitas	3 orang
7	Perencana	2 orang

Sumber Data: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut

b. Pembentukan Tim Manajemen Krisis Kesehatan / Klaster kesehatan Provinsi Sulawesi Utara

Tim Manajemen Krisis Kesehatan / Klaster Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam menghadapi krisis kesehatan, mengelola pengorganisasian krisis kesehatan, merencanakan alokasi anggaran untuk pengelolaan krisis kesehatan, meningkatkan ketersediaan akses pelayanan dan perlindungan kesehatan serta kebutuhan logistik kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat dan tenaga kesehatan, merencanakan alokasi anggaran untuk pengelolaan krisis kesehatan, meningkatkan ketersediaan akses pelayanan dan perlindungan kesehatan serta kebutuhan logistik kesehatan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dan kolaborasi dengan badan dan lembaga/organisasi yang menangani penanggulangan bencana di wilayah terdmpak baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan, melakukan rapat koordinasi rutin dan memastikan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat pra krisis kesehatan agar bisa berjalan dengan baik, mengoperasikan Pusat Darurat Krisis Kesehatan (Health Emergency Operation Center/HEOC) saat siaga darurat dan tanggap darurat krisis kesehatan serta melakukan upaya pasca krisis kesehatan.

Adapun dukungan Personil Tim Manajemen Krisis Kesehatan/Klaster Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11: Tim Manajemen Krisis Kesehatan/Klaster Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Ketua Tim	1 Orang
2	Sekretaris Tim	1 Orang
3	Sub Klaster Pengendalian Penyakit	2 Orang
4	Sub Klaster Kesehatan Lingkungan	1 Orang
5	Sub Klaster Pelayanan Kesehatan	5 Orang
6	Sub Klaster Kesehatan Reproduksi	1 Orang
7	Sub Klaster Kesehatan Jiwa	2 Orang
8	Sub Klaster Pelayanan Gizi	2 Orang
9	Sub Klaster Identifikasi Korban Mati	1 Orang

10	Tim Logistik Kesehatan	3 Orang
11	Tim Data dan Informasi	1 Orang
12	Tim Promosi Kesehatan	1 Orang
13	UnsurInstitusi/kantor yang memiliki tugas surveilans dan kekarantinaan kesehatan	8 Orang
14	Laboratorium	3 Orang

Sumber Data: Dinas Kesehatan Daerah Prov. Sulut

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- Dalam hal pelaksanaan dan Penerapan SPM bidang kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2023 tak luput dari berbagai kendala antara lain:
- 1) Tidak ada surat keputusan kepala daerah terkait penetapan sasaran masyarakat yang berpotensi terdampak krisis kesehatan akibat bencana dari Pemprov;
 - 2) Tidak tersedianya anggaran memadai dalam penanggulangan krisis kesehatan di tingkat provinsi, walaupun sudah ada kode rekening khusus di APBD untuk itu;
 - 3) Belum ada definisi operasional spesifik terkait kapan disebut bencana provinsi atau berpotensi bencana provinsi;
 - 4) Belum terpadu komprehensif dengan BPBD, info kebencanaan termasuk data korban terdampak bencana terlambat diterima oleh Dinkesda sebagai pelaksana teknis;
 - 5) Pelayanan kesehatan pada penduduk terdampak Krisis Kesehatan masih terfragmentasi;
 - 6) belum terpadu dgn pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh kabupaten kotaSecara umum masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS);
 - 7) Sanitasi lingkungan yang sangat buruk menjadi potensi pemicu sumber penyakit yang berpotensi KLB;
 - 8) secara teknis kurangnya SDM dan jumlah tenaga yang terlatih untuk penanggulangan KLB dan tidak maksimalnyaTim Gerak Cepat (TGC) untuk terlibat dalam penanganan dan penanggulangan KLB;
 - 9) Kesiapan dana dan obat-obatan oleh Kabupaten/Kota untuk menghadapi KLB.

b. Solusi

- Sedangkan untuk solusi pemecahan masalah adalah:
- 1) Adanya revisi Surat Keputusan terkait penetapan dampak krisis Kesehatan;
 - 2) Ketersediaan data untuk program SPM;
 - 3) Meningkatkan kembali koordinasi dengan lintas program/lintas sektor terkait penanganan tanggap darurat;
 - 4) Perlu adanya pertemuan secara berkala untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan tanggap darurat;
 - 5) Adanya Peraturan, surat edaran/Instruksi Kepala Daerah tentang Kewaspadaan Dini penyakit potensial KLB terkait pengendalian dan pencegahan KLB;
 - 6) Pemutakhiran informasi <http://dinkes.sulutprov.go.id> terkait kondisi epidemiologi penyakit menular potensial KLB provinsi Sulawesi Utara;
 - 7) Melakukan tatalaksana kasus yang tepat sesuai kasus penyakitnya;

- 8) Adanya pelatihan surveilans dan epidemiologi untuk pencegahan dan pengendalian KLB;
- 9) Adanya edukasi/promosi kesehatan kepada masyarakat tentang cara – cara Pencegahan dan pengendalian penyakit menular potensial KLB melalui media elektronik, cetak, dan media sosial;
- 10) Memperkuat jejaring baik Dinas Kabupaten, Dinas terkait dan sektor terkait yang terlibat dalam pengendalian dan penanggulangan KLB;
- 11) Melakukan analisa epidemiologi deskriptif terhadap laporan penyakit potensial KLB guna menegakkan SDK-KLB;
- 12) Mengevaluasi keberhasilan penanggulangan penyakit menular yang telah dilaksanakan.

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara

1. Kondisi dan Capaian SPM

Jenis Pelayanan Dasar bidang Pekerjaan Umum pada Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik Regional lintas kabupaten/kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran.
- b. Kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Adapun Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. Penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas Kabupaten/Kota; dan
- b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Tabel 4.12: Kondisi dan Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/ OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	A K S I
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100 %	
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Regional Lintas Kabupaten/Kota					100	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1.015.200	890.526	124.674	100%	
Tidak ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/ Kota							
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%	
	1 Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab./ Kota	3	3	0	100%	
	UPLOAD FILE PENDUKUNG						
	PENDATAAN					100%	
	PERHITUNGAN KEBUTUHAN					100%	
	PERENCANAAN					100%	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota					20%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:		965.075	729.768	235.307	100%	
Tidak ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/ Kota							
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%	
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%	
	1 Pembinaan pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional / SPALD-Regional Kabupaten/Kota (pendataan, penghitungan kebutuhan dan perencanaan)	Jumlah Kab./ Kota	0	0	0	100%	
	UPLOAD FILE PENDUKUNG						
	PENDATAAN					100%	
	PERHITUNGAN KEBUTUHAN					100%	
	PERENCANAAN					100. %	

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut

2. Alokasi Anggaran

Tabel 4.13: Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD SULAWESI UTARA	0
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	0
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1,856,287,527
	APBD	1,856,287,527
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	1,856,287,527
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut

3. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang tertibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, adalah 48 ASN (PNS/THL) Bidang Cipta Karya.

4. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.14: Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum

PERMASALAHAN PENERAPAN SPM
Pengumpulan Data Basis Data yang terintegrasi mengenai Sistem Penyediaan Air Minum dan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik yang memuat informasi mengenai jumlah warga negara yang mengakses layanan serta jumlah sarana prasarana penunjang SPM belum tersedia.
Penghitungan Kebutuhan Tidak tersedianya petugas yang menghitung selisih antara kebutuhan dengan ketersediaan sarana prasarana yang ada.
Perencanaan dan Penganggaran Anggaran yang disiapkan untuk pencapaian pemenuhan SPM masih kurang.
Pelaksanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk pencapaian SPM masih jauh dari target yang ditetapkan.
Lain – Lain - Belum tersedia SPAM Regional - Belum tersedia SPALD Regional
SOLUSI
1 Pengusulan alokasi anggaran untuk penyusunan dokumen pendukung RISPALD;
2 Pengajuan permohonan pembebasan lahan untuk pembangunan fisik SPAM Regional Bimantara yang direncanakan akan dilaksanakan TA. 2025;
3 Pengusulan kembali pekerjaan penunjang penerapan SPM;
4 Pengusulan pelatihan pengembangan kapasitas (<i>capacity building</i>) SDM;
5 Pembinaan, pengawasan secara rutin terkait SPM baik di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sumber Data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Prov. Sulut

D.URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi
Sulawesi Utara

1. Kondisi dan Capaian SPM

Data capaian SPM Perumahan Rakyat tahun 2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.15: Data Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi				100.00 %	
		Tidak Terjadi Bencana (Tidak Akan Masuk Kedalam Perhitungan)				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	0	0	0	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				100.00 %	
	B. JUMLAH MUTU BARANG/ JASA/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %	
	1 Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0%	
	2 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	0	0%	
	3 Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	0%	
	4 Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	0	0	0%	
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi				21.38%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	78	78	78	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20 %	
	B. JUMLAH MUTU BARANG/ JASA/ SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	21.38 %	
	1 Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	78	78	0	100.00%	
	2 Subsidi uang sewa	0	0	0	0%	
	3 Penyediaan rumah layak huni	0	0	0	0%	

Sumber Data: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut

Adapun realisasi pencapaian pada program penyelesaian ganti kerugian dan santuan tanah untuk pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Bandara- Likupang, target 54 rumah tangga, terlayani 54 rumah tangga.
- b. Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Manado Outer Ring Road III, target 18 rumah tangga, terlayani 18 rumah tangga.

- c. Pengadaan tanah untuk Pembangunan Lahan Sekolah SMA Negeri I Pinogaluman, target 3 rumah tangga, terlayani 3 rumah tangga.
- d. Pengadaan tanah untuk ,Pengadaan Lahan Sekolah SMKN 1 Modayag, target 3 rumah tangga, terlayani 3 rumah tangga.

Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah ini, sebagian besar sudah diserahkan langsung kepada yang bersangkutan, namun ada beberapa yang melalui konsinyasi di Pengadilan sambil pihak yang berhak menerima, memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen.

2. Alokasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16: Alokasi Anggaran pelaksanaan pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2023

NO.	SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN	
				(Rp)	%
			39.101.223.900	37.729.893.998	96,49%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	82.027.300	81.246.280	99,09%
	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Provinsi	24.531.600	24.206.750	98,68%
	2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai relokasi perumahan	23.841.900	23.640.400	99,15%
	3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	33.653.800	33.399.130	99,24%
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA				
	1	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	39.019.196.600	37.648.647.718	96,49%

Sumber Data: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Prov. Sulut

3. Dukungan Personil

Dukungan personil yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara saat ini masih kurang, sehingga diperlukan penambahan personil.

4. Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapan dan pencapaian SPM tahun 2023 untuk SPM Fasilitas penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Provinsi, dalam hal ini penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi mengalami permasalahan, yaitu adanya refocusing anggaran, sehingga target dan pencapaian yang seharusnya bisa lebih dimaksimalkan tidak dapat dilaksanakan. Penerapan dan pencapaian SPM di tahun mendatang akan lebih optimal lagi apabila perencanaan, pelaksanaan, serta penganggaran terakomodir dengan baik, sehingga pemberian santunan di tahun berjalan bisa tuntas sehingga tidak dibebankan pada tahun berikutnya.

E. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara

1. Kondisi dan Capaian SPM

Kategori Indeks Pencapaian SPM Trantibum dengan total pencapaian **100%** (**Tuntas Paripurna**) dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 4.17: Data Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/ OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	A K SI
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100.00 %	
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi				100.00 %	
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	141	141	0	100%	
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. JUMLAH MUTU BARANG/ JASA/ SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %	
	1 Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa: a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	141	141	0	100%	
	2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli	6	6	0	100%	
	3 Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	548	548	0	100%	
	4 Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1	1	0	100%	
	5 Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-			-	

6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	-	-
---	--	---	---

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara

2. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada APBD Tahun Anggaran 2023 telah disusun dan dioptimalkan dalam penggunaannya.

3. Dukungan Personil

Jumlah Dukungan personil/anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk pencapaian SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Tahun 2023 adalah sebanyak 584 anggota.

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang muncul yakni belum adanya alokasi anggaran untuk SPM dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang belum optimal. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah memasukan program/kegiatan yang mengakomodir SPM pada dokumen perencanaan dan melakukan pembinaan yang berkelanjutan untuk personil/anggota di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

F. URUSAN SOSIAL

Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara

1. Kondisi dan Capaian SPM

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM Sosial mencakup SPM Sosial Daerah Provinsi dan SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial Daerah Provinsi terdiri dari:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dengan standar teknis. Dan untuk SPM Bidang Sosial ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

Standar teknis tersebut memuat:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
- c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
- b. Anak terlantar adalah untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- c. Lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia tarlantar di dalam panti;
- d. Gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
- e. Korban bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Tabel 4.18: Data Capaian SPM Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					94.29 %	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti		TUNTAS UTAMA			90.91 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	195	195	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					10.91 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	54.55 %	
	1 Penyediaan permakanan	Orang	195	195	0	100.00 %	
	2 Penyediaan sandang	Orang	175	175	0	100.00 %	
	3 Penyediaan asrama yang mudah diakses **	Unit	11	11	0	100.00 %	
	4 Penyediaan alat bantu **	Orang	4	4	0	100.00 %	
	5 Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	175	175	0	100.00 %	
	6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	175	175	0	100.00 %	
	7 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	0	0	0	0.00 %	
	8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0	0.00 %	
	9 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0	0.00 %	
	10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga** / Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	0	0	0.00 %	
	11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	0	0	0	0.00 %	

2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti				88.89 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.61 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	1226	1220	6	99.51 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					9.28 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	46.40 %
	1 Pengasuhan	Orang	0	0	0	0.00 %
	2 Penyediaan permakanan	Orang	1226	1220	6	99.51 %
	3 Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0.00 %
	4 Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit	45	26	19	57.78 %
	5 Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	20	20	0	100.00 %
	6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1226	1220	6	99.51 %
	7 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	20	20	0	100.00 %
	8 Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak**	Orang	0	0	0	0.00 %
	9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0	0.00 %
	10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang	0	0	0	0.00 %
	11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	0	0	0	0.00 %
	12 Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti**	Orang	1	1	0	100.00 %
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti				91.67 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	209	209	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					11.67 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	58.33 %
	1 Penyediaan permakanan	Orang	209	209	0	100.00 %
	2 Penyediaan sandang	Orang	55	55	0	100.00 %
	3 Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit	11	11	0	100.00 %
	4 Penyediaan alat bantu**	Orang	6	6	0	100.00 %
	5 Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	Orang	209	209	0	100.00 %
	6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	209	209	0	100.00 %
	7 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	0	0	0	0.00 %
	8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan**	Orang	0	0	0	0.00 %
	9 Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	0	0	0	0.00 %
	10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	Orang	0	0	0	0.00 %
	11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	Orang	0	0	0	0.00 %
	12 Pemulasaraan**	Orang	2	2	0	100.00 %

4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	3	0	3	100%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 Penyediaan permakanan	Orang	3	0	3	0.00 %	
	2 Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0.00 %	
	3 Penyediaan asrama yang mudah diakses**	Unit	0	0	0	0.00 %	
	4 Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	0	0	0	0.00 %	
	5 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	0	0	0	0.00 %	
	6 Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang	0	0	0	0.00 %	
	7 Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	0	0	0	0.00 %	
	8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak**	Orang	0	0	0	0.00 %	
	9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0	0.00 %	
	10 Pemulangan ke daerah asal**	Orang	0	0	0	0.00 %	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	9329	9329	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 Penyediaan permakanan	Orang	9329	9329	0	100.00 %	
	2 Penyediaan sandang	Orang	1500	1500	0	100.00 %	
	3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi**	Unit	7	7	0	100.00 %	
	4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan**	Orang	150	150	0	100.00 %	
	5 Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	350	350	0	100.00 %	

Sumber Data: Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khusus Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti tidak ada realisasi karena berdasarkan hasil assesment baik Kabupaten maupun Kota tidak ada Tuna Sosial khusus Gelandangan dan Pengemis, selain itu juga *di Provinsi Sulawesi Utara belum memiliki panti milik Pemerintah maupun Masyarakat yang menangani Tuna Sosial khusus Gelandangan dan Pengemis.*

2. Alokasi Anggaran

Tabel 4.19: Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	660.499.936	551.744.350	APBD
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	807.730.924	798.399.100	APBD
		579.145.438	530.836.698	APBD BPAR Tomohon
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	523.013.191	508.296.200	APBD
		1.190.524.980	1.159.558.338	APBD BPLU Manado
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khusus Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	10.053.452	1.350.000	APBD
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi	1.939.449.899	1.890.133.900	Korban Bencana Alam maupun Bencana Sosial

Sumber Data: Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Untuk pengalokasian anggaran belum sesuai dengan standar teknis yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial. Pada Tahun 2023 pengalokasian anggaran masih difokuskan pada penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan asrama yang mudah diakses di dalam panti, pemberian bimbingan fisik mental spiritual dan sosial, pemberian pelayanan penelusuran keluarga untuk PMKS dalam panti milik masyarakat tetapi tidak untuk setahun dan penyediaan bufferstok untuk permakanan, penyediaan sandang, penanganan khusus bagi kelompok rentan serta pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana (alam dan sosial) daerah Provinsi. Untuk Panti LU milik Pemerintah alokasi anggaran diperuntukkan untuk penyediaan makanan selama setahun, perbekalan kesehatan, penyediaan asrama dan bimbingan fisik mental dan spiritual. Untuk Balai anak alokasi anggaran diperuntukkan untuk penyediaan permakanan, penyediaan asrama, pengasuhan, pembekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial dan bimbingan keterampilan.

3. Dukungan Personil

Personil yang tersedia pada Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pembangunan Kesejahteraan Sosial berjumlah Pegawai 91 orang dengan rincian sebagai berikut:

Menurut Kualifikasi Pendidikan

S3	:	1 orang
S2	:	9 orang
S1/DIV	:	50 orang
SM/D3/D1	:	16 orang
SMU	:	11 orang

Menurut Kualifikasi Pangkat/Golongan

Pembina Utama Madya, IV/d	:	1 orang
Pembina Utama Muda, IV/c	:	-

Pembina Tingkat I, IV/b	:	4 orang
Pembina, IV/a	:	7 orang
Penata Tingkat I, III/d	:	40 orang
Penata, III/c	:	8 orang
Penata Muda Tingkat I, III/b	:	17 orang
Penata Muda, III/a	:	8 orang
Pengatur Tingkat I, II/d	:	6 orang
Pengatur, II c	:	4 orang
Pengatur Muda Tingkat I, II/b	:	-
Pengatur muda, II/a	:	-
Juru Tingkat I	:	-
Juru	:	-

Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional dengan rincian sbb :

Jabatan Struktural

Eselon II a	:	1 orang
Eselon III a	:	5 orang
Eselon III b	:	2 orang
Eselon IV a	:	2 orang
Eselon IV b	:	6 orang

Jabatan Fungsional

Fungsional Tertentu :	18 orang
Fungsional Umum :	53 orang

Pegawai tersebar di 7 unit Eselon III, yakni:

1.	Sekretariat	:	18 orang
2.	Bidang Rehabilitasi Sosai	:	10 orang
3.	Bidang Pemberdayaan Sosial	:	8 orang
4.	Bidang Penanganan FM	:	8 orang
5.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	:	10 orang
6.	BPSLU Senja CeraH Manado	:	20 orang
7.	BPSAR Maka'aruyen Tomohon	:	13 orang

Sesuai dengan standar teknis SPM Bidang Sosial daerah Provinsi, Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial dan Relawan Sosial. Dan setiap panti sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional. Untuk perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Pemerintah Daerah Provinsi harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial.

4. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hanya memiliki 1 Panti Lanjut Usia dan belum memiliki Panti Anak, Panti Disabilitas dan Panti untuk Tuna Sosial sehingga penanganan PMKS dalam panti masih melibatkan panti-panti milik masyarakat. Sedangkan untuk anak sudah terdapat 1 balai pelatihan yang nantinya akan dikembangkan juga menjadi Panti Anak;

- 2) Pengalokasian anggaran untuk Panti masih terkait dengan Permakanan dan lain-lain yang masih sangat jauh dari standar teknis SPM bidang sosial daerah provinsi yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial dalam kaitannya dengan Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa;
- 3) Panti yang ada belum memenuhi syarat berkaitan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang sudah ditetapkan dengan Standar Teknis SPM Bidang Sosial;
- 4) Masih minimnya pemahaman tentang Standar Pelayanan Minimal.

b. Solusi

- 1) Sesuai dengan pembagian kewenangan bahwa penanganan PMKS dalam panti merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi maka Pemerintah Provinsi mengupayakan untuk mendirikan Panti yang belum ada;
- 2) Diadakan pengumpulan data dilapangan untuk menghitung pembiayaan setiap panti sesuai dengan standar teknis yang sudah ditetapkan agar dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan;
- 3) Diadakan perekrutan pegawai sesuai dengan ketentuan SDM Kesos dalam panti ataupun melakukan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyediaan SDM yang dimaksud;
- 4) Melakukan sosialisasi tentang Standar Pelayanan Minimal kepada pegawai di Dinas Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota.